

EFEKTIVITAS PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA INDONESIA-KANADA DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS KEPEMUDAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alfi Febriansyah¹

¹Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the effectiveness of Indonesia-Canada Youth Exchange Program in Kalimantan Timur in order to increase youth activity, primary data were obtained through key informant namely Committee from Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, and 4 informants consisting of PCMI Kalimantan Timur, also alumnae of Indonesia-Canada Youth Exchange Program from Kalimantan Timur Province, also supported by secondary data which is relevant archive. Furthermore, it was analyzed using Analysis Qualitative Data with CIPP Model through scheme of FAO/Soekartawi evaluation research activities. Result of the research shows that Indonesia-Canada Youth Exchange Program in Kalimantan Timur is not effective to increase youth activity, because in implementation is founded that some components of program success factor were not implemented.

Keywords: *Effective, Youth Exchange, CIPP*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui apakah efektif program PPIK yang dijalankan di Provinsi Kalimantan Timur kaitannya dalam meningkatkan aktivitas kepemudaan, dengan sumber data diambil dari hasil wawancara dengan Key Informan yakni Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda Dispora Kaltim, dan 4 informan yakni alumni PPIK asal Kalimantan Timur dan PCMI Kalimantan Timur, didukung data sekunder arsip-arsip relevan dengan materi yang diteliti. Analisa data yang digunakan adalah Analisis Data menggunakan evaluasi model CIPP dengan skema FAO/Soekartawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada di Kalimantan Timur tidak efektif meningkatkan aktivitas kepemudaan, karena pada pelaksanaannya ditemukan beberapa komponen keberhasilan program tidak dilaksanakan.

Kata Kunci: *Efektif, Pertukaran Pemuda, CIPP*

Pendahuluan

Berdasarkan BPS tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 257.890.321 jiwa dan 62.061.356 jiwa diantaranya adalah pemuda dan untuk provinsi Kalimantan Timur sendiri pada data sensus tahun 2010 oleh BPS untuk kelompok umur 15 tahun sampai 29 tahun terdapat 997.801 orang. Jumlah yang menjanjikan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana yang dicurahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Namun, dengan bonus demografi pemuda yang luar biasa dalam jumlah penduduk negara kita tercinta, Indonesia khususnya provinsi

Kalimantan Timur, bisa juga menjadi ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa. Pemuda sendiri bisa menjadi sumber pembangunan dan juga bisa menjadi sumber kehancuran negara kita. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus kenakalan pemuda yang meresahkan negeri ini akibat kurangnya wadah bagi mereka bereks presi seperti halnya pergaulan bebas, terjerat kasus Narkoba yang mana berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kalimantan Timur menyebutkan bahwa kasus Narkoba di provinsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 terdapat 749 kasus, pada 2015 terdapat 999 kasus dan pada 2016 meningkat menjadi 2438 kasus yang membuat Kalimantan Timur menduduki peringkat 3 nasional dalam kasus Narkoba, kemudian juga pemuda ikut dalam golongan radikalisme, dan juga tindakan kriminalitas lainnya daripada menjadi pemuda yang memiliki peran sebagai agen perubahan, kontrol sosial, pelaku pelopor dalam masyarakat, pelaku bela negara dan sebagainya.

Maka dari itu disinilah peran pemerintah masuk untuk senantiasa memberikan ruang gerak positif kepada pemuda-pemuda kita agar jalan mereka menuju Indonesia maju terarah. Dengan itu lahirlah Undang-Undang RI No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mencuat kepermukaan sebagai tanggung jawab negara dalam mengambil pendirian. Dengan dasar tujuan pembangunan global, salah satu misi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) poin satu yaitu meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda. Dalam hal ini kita akan menyoroti di bidang penyadaran kepemudaan yang difokuskan untuk menjawab terwujudnya pemuda Indonesia yang berdaya saing dan tertuang pada Rencana Strategis Kemenpora RI 2016-2019 yang mana arah kebijakan Kemenpora RI dalam pembangunan kepemudaan adalah dengan meningkatkan partisipasi pemuda melalui peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. Dengan dasar itu Kemenpora RI membuat program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yang mana wujud dari kebijakan penyadaran kepemudaan yang mana pada hakikatnya karakter pemuda Indonesia dibangun yang diantaranya keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bertanggung jawab, memiliki jati diri, kemandirian dan nasionalisme yang tinggi yang mana kader-kader yang terpilih menjadi delegasi akan belajar banyak mengenai hal di atas.

Atas dasar pemikiran di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih mendalam terhadap pelaksanaan program PPIK di provinsi Kalimantan Timur kaitannya dengan meningkatkan aktivitas kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kerangka Konsep dan Teori

Evaluasi Program

Wibawa (1994:5) berpendapat bahwa para pemangku kebijakan dalam proses implementasi kebijakan diinterpretasikan ke dalam program karena

dengan adanya program lebih membuat kebijakan tersebut *aplicable* dan siap dilaksanakan. Setelah diterjemahkan ke dalam suatu program dan dilakukan dengan tindakan fisik kemudian program tersebut akan menghasilkan *output* ataupun dampak.

Arikunto mengatakan bahwa Evaluasi Program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program (2013:325). Selain itu evaluasi program juga merupakan upaya dalam mengukur keefektifitasan komponen sebuah program dalam mencapai tujuan program tersebut (2013:17). Evaluasi program dikembangkan dari evaluasi secara umum, yaitu dari proses pengumpulan data, analisis, dan digunakannya untuk pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek yang dievaluasi.

Evaluasi program dipertujukan untuk melihat pencapaian target program yang dengannya dapat ditentukan seberapa jauh target program tersebut telah tercapai dan kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan program yang telah dirumuskan sebelumnya dalam tahap perencanaan program.

Kaitannya dengan kebijakan publik, menurut Arikunto (1988:22) terdapat empat kemungkinan kebijakan yang timbul akibat dari evaluasi suatu program, yaitu: a) menghentikan program tersebut ketika sudah dianggap tidak bermanfaat, b) merevisi program jika memang terdapat poin yang tidak sesuai dengan harapan, c) melanjutkan program jika memang sudah sesuai dengan harapan, d) menyebarluaskan program jika dinilai sangat baik dan perlu diaplikasikan di tempat dan di waktu yang lain.

Konsep Evaluasi Program dengan Model CIPP

Dalam mengevaluasi suatu program, banyak model yang dapat digunakan sebagai alat analisis salah satunya *CIPP (Context - Input - Process - Product)*. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Danial Stufflebeam dan rekan-rekannya di *Ohio State University* pada tahun 1991, yang mana pada keempat butir dalam model tahapan tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan akan tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan kesemuanya, keunikan dari model-model tersebut adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program.

Evaluasi *Context* meliputi analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Dalam evaluasi *context* terdapat pembahasan tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu, relevansi dan keterkaitan program, pada evaluasi konteks merupakan tahapan yang memiliki misi untuk menyediakan suatu rasional/landasan untuk penentuan maksud/tujuan. Untuk penelitian ini, komponen pada evaluasi *context* adalah latar belakang lahirnya program dan relevansi program dengan visi Kalimantan Timur.

Evaluasi *input* meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang ada, alternatif-alternatif cara ataupun strategi yang harus dipertimbangkan dalam mencapai suatu maksud atau tujuan. Menilai kapabilitas sistem dan mengidentifikasinya, alternatif

strategi suatu program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan waktu dan penjadwalan. Untuk penelitian ini, komponen pada evaluasi *input* adalah panduan pelaksanaan seleksi dan kriteria peserta.

Evaluasi *process* merupakan evaluasi yang dibuat dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktivitas. Tujuan utama dalam evaluasi *process* adalah mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk juga didalamnya segala sesuatu yang baik untuk dipertahankan, mendapatkan informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan. Untuk penelitian ini, komponen pada evaluasi *process* adalah sosialisasi, seleksi, pembekalan dan *post program activity*.

Evaluasi *product* adalah evaluasi yang mengukur ketepatan sasaran dalam mencapai tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah diperoleh. Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Evaluasi produk merupakan tahap akhir yang berfungsi untuk membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan dalam analisis hasil yang diperlukan sebagai perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan program yang dicapai. Untuk penelitian ini, komponen pada evaluasi *product* adalah pemuda aktif kegiatan kepemudaan.

Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada

Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada (PPIK) atau juga biasa disebut *Indonesia-Canada Youth Exchange Program (ICYEP)* merupakan program pertukaran atas kerjasama pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kemempora RI bersama *Canada World Youth (CWY)*. Program ini berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dengan dibagi menjadi 2 (dua) fase yaitu fase Kanada selama 3 (tiga) bulan dan fase Indonesia selama 3 (tiga) bulan. Peserta program akan tinggal bersama orang tua asuh selama mengikuti program dengan dipasangkan dengan seorang pemuda dari Kanada untuk tinggal bersama atau biasa disebut *Counterpart*. Selama pelaksanaan program, akan diawasi oleh *Project Supervisor*.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan potensi diri sebagai pemuda serta kegiatan-kegiatan yang memberikan pengalaman langsung pada pemahaman antar budaya. Salah satu komponen utama pada program ini adalah *Work Placement* yang mana peserta akan terjun langsung pada dunia kerja yang intensif akan aspek profesionalisme. Kegiatan utama lainnya adalah *Educational Activity Day (EAD)* yang merupakan hari dimana peserta bisa mengeksplor pengetahuan mereka tentang isu-isu di negara Kanada di bidang politik, geografi, ekonomi, budaya dan lain-lain juga biasanya diakhir sesi akan diajarkan tarian-tarian tradisional dengan tujuan untuk persiapan *cultural show* di akhir fase. Selain itu juga terdapat banyak kegiatan lain seperti *fund-raising* juga penampilan budaya.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian yang dipilih adalah desain non-eksperimental yaitu *after-only study of participants*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah wawancara yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung, dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisa data yang digunakan adalah analisis data menggunakan model evaluasi *CIPP* dengan sistematika penelitian FAO/Soekartawi.

Hasil Penelitian

Aspek Context: Latar Belakang dan Relevansi Program

Latar belakang dari adanya program PPIK adalah sebagai wujud implementasi dari Undang-undang No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mana didalamnya disebutkan bahwa pembangunan kepemudaan berlandaskan 3 (tiga) pilar yang salah satunya adalah penyadaran kepemudaan yang kemudian perwujudannya diolah menjadi Pertukaran Pemuda Antar Negara yang mana PPIK menjadi salah satu program yang diunggulkan untuk menjadi wadah maupun media para pemuda untuk mengembangkan diri mereka serta *skill* yang ada agar dapat berkontribusi semaksimal mungkin untuk negara khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini Kemenpora RI menginisiasi program PPIK dengan *CWY* yang kemudian proses penyeleksiannya diserahkan ke Dispora Provinsi Kalimantan Timur. namun, temuan di lapangan, dari pihak Dispora Kaltim tidak mengetahui mengenai PPIK itu sendiri dan latar belakang program tersebut lahir. Jika, dicermati lebih mendalam, pemahaman mengenai apa itu PPIK serta yang melatar belakangi program ini lahir penting untuk diketahui oleh pihak penyelenggara seleksi, karena pihak penyeleksi dapat memperhitungkan individu peserta seleksi yang lolos untuk bisa sesuai atau tidak dilihat dari segala aspek berkaitan dengan program PPIK.

Relevansi tersebut, dilihat dari tujuan program PPIK yang pada intinya membangun jiwa kepemudaan agar dapat memiliki kompetensi sehingga meningkatkan aktivitas kepemudaan yang mana akan menambah pembangunan yang ada juga seiring sejalan dengan visi Kalimantan Timur yang ingin menjadi Provinsi yang berdaulat dengan misinya memiliki sumber daya manusia dalam hal ini pemuda menjadi salah satu fokus yang diharap dapat berakhlak mulia serta berdaya saing. Kemudian juga jika dilihat dari visi Dispora Kaltim yang mengatakan, “terwujudnya kemampuan sumberdaya kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan berprestasi”, yang mana dengan misi pertamanya adalah pemuda merupakan sumberdaya yang kualitasnya harus ditingkatkan. Peluang ini menjadi sangat berharga bagi Kalimantan Timur untuk mengirimkan pemuda terbaiknya untuk menimba ilmu serta memperkaya pengalaman juga bertemu orang baru untuk saling bertukar pikiran agar dapat meningkatkan kegiatan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur yang mana menjadi salah satu kontribusi pemuda untuk pembangunan yang ada di Kalimantan Timur.

Aspek Input: Panduan Pelaksanaan Seleksi dan Kriteria Peserta

Panduan pelaksanaan seleksi menjadi penting untuk tersedia karena merupakan ukuran standar dalam penyeleksian peserta PPIK sehingga kualitas dari masing-masing provinsi yang dihasilkan sama dan merujuk pada kebutuhan program. Pada panduan pelaksanaan seleksi telah terpenuhi indikator keberhasilan program karena terdapat panduan tersebut yang mana di dalam panduan yang ada terdapat 7 (tujuh) poin petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti oleh Dispora Kaltim dalam tujuan mendapatkan delegasi terbaik dari Provinsi Kalimantan Timur untuk program PPIK. Namun yang menjadi masalah disini dan menjadi sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi adalah mengenai tidak adanya kontrol saat melaksanakan panduan seleksi tersebut, karena hal-hal yang bersifat teknis terkadang bisa terlewat maupun dilanggar jika tidak ada kontrol atau pengawasan. Menurut George R. Terry (2010: 10) mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumberdaya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Kriteria peserta merupakan komponen penting dalam penentuan delegasi PPIK, karena dengan adanya kriteria menjadi lebih mudah dan tepat sasaran individu yang terpilih. Mengacu pada indikator keberhasilan program, kriteria yang ada sudah terpenuhi oleh peserta PPIK asal Kalimantan Timur. Namun ada beberapa hal menjadi catatan dan menjadi masukkan bagi Dispora Kaltim, misalnya penambahan kriteria terkait kemampuan *inter* dan *intra personal*, karena kemampuan ini merupakan modal ataupun pondasi untuk bertahan di dalam program yang penuh akan kegiatan sosial karena dikutip dari *Dictio.id* (2015) bahwa kemampuan *intra personal* meliputi percaya diri, penilaian diri, kesadaran emosi dan proaktif sedangkan *inter personal* meliputi memanfaatkan keragaman, kepemimpinan, komunikasi efektif dan sinergi. Di dalam program, peserta dituntut untuk pandai bersosialisasi baik itu di rumah, pekerjaan maupun masyarakat sekitar, apalagi dalam kondisi berbeda budaya sehingga penting untuk kriteria tersebut ditambahkan. Selain itu juga walaupun para peserta harus berkesesuaian dengan poin kriteria yang ada, namun peserta juga harus pandai dalam berkomunikasi secara verbal bukan hanya secara tertulis dalam bahasa Inggris. Syarat *English Proficiency* tidaklah bisa menjadi patokan untuk peserta layak atau tidaknya mengikuti program, karena *TOEFL* khususnya *paper based test* yang selama ini digunakan oleh Dispora Kaltim hanyalah tes kemampuan bahasa Inggris yang berbasis tertulis, sedangkan kegiatan selama program lebih ke komunikasi secara langsung dalam *conversation*.

Aspek Process: Sosialisasi, Seleksi, Pembekalan dan Post Program Activity

Sosialisasi mengenai seleksi PPIK menjadi penting untuk dilaksanakan agar para pemuda yang ada di Kalimantan Timur dapat mengetahui dan memahami sehingga pada akhirnya ketika seleksi dilaksanakan, persaingan menjadi kompetitif lalu dapat menghasilkan peserta atau delegasi yang terbaik. Namun pada kenyataannya komponen sosialisasi tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Dispora Kaltim hanya mengadakan rapat koordinasi se-Kalimantan Timur dan juga menyurati Dispora se-Kalimantan Timur juga mensosialisasikan via media cetak. Walaupun Dispora Kaltim tidak melaksanakan sosialisasi langsung ke pusat pemuda, namun PCMI Kalimantan Timur selaku organisasi perkumpulan alumni PPAN asal Kalimantan Timur dengan sukarela melakukan *roadshow* ke kampus-kampus serta organisasi. Akan tetapi juga tidak dapat maksimal karena hanya dapat dilaksanakan di Samarinda saja, hal ini perlu diperbaiki, karena nama Kalimantan Timur bukan hanya Samarinda saja, ada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota lainnya yang juga memiliki potensi pemuda yang sama-sama memiliki hak untuk mewakili Kalimantan Timur dalam program PPIK.

Seleksi peserta merupakan proses penjaringan peserta PPIK di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan delegasi terbaiknya pada program PPIK. Komponen seleksi peserta dengan indikatornya seperti adanya tim seleksi, mekanisme seleksi, dan lokasi telah terpenuhi. Tim seleksi terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing yang kemudian berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dalam menyesuaikan kebutuhan program. Mekanisme seleksi yang digunakan adalah sistem gugur yang mana dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang di dalamnya termasuk tes tertulis, *discussion group*, psikotes, tes *TOEFL*, wawancara dan unjuk bakat kebudayaan dan semua kegiatan seleksi tersebut dilaksanakan di kota Samarinda yaitu di gedung Pramuka, Balai Bahasa dan Kantor Dispora Kaltim. Namun seleksi ini hanya berpusat di satu kota saja, yaitu kota Samarinda, sehingga kemungkinan besar peserta yang lolos adalah warga kota Samarinda atau yang sedang menempuh studi di Samarinda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembekalan merupakan suatu proses untuk memberikan bekal, yang mana dalam hal ini adalah para peserta PPIK asal Kalimantan Timur seharusnya diberikan pembekalan bagaimana program PPIK, apa saja hal-hal yang harus menjadi perhatian, sehingga ketika peserta masuk ke dalam program, mereka tidak akan merasa kaget lalu mereka merasa siap dan cepat beradaptasi. Namun berdasarkan fakta penelitian, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan pembekalan sama sekali kepada peserta yang akan mengikuti program PPIK, kemudian pembekalan yang dilaksanakan oleh PCMI Kalimantan Timur pun dirasa belum dapat maksimal karena kesibukan para alumni juga peserta terpilih.

Post Program Activity merupakan suatu tugas yang diberikan kepada peserta PPIK termasuk peserta asal Kalimantan Timur untuk melaksanakan

atau menyelenggarakan suatu proyek atau program atau juga kegiatan sosial yang diharapkan bisa berkelanjutan dalam konteks pembangunan kepemudaan di daerah Provinsi Kalimantan Timur, karena *PPA* sendiri masuk dalam syarat menjadi peserta PPIK. Pada fakta di lapangan, alumni PPIK asal Kalimantan Timur tidak melaksanakan atau melaporkan *PPA* mereka ke Dispora Kaltim maupun ke Kemenpora RI. Jika para alumni tidak melaksanakan *PPA*, maka berarti belum ada sumbangsih nyata pada kegiatan kepemudaan yang mereka lakukan di Kalimantan Timur setibanya mereka dari program.

Aspek Product: Pemuda Aktif Kegiatan Kepemudaan

Pemuda aktif kegiatan kepemudaan adalah harapan ataupun *output* yang diinginkan setelah peserta mengikuti program PPIK, karena dengan mereka aktif kegiatan kepemudaan, sedikit banyak mereka dapat ikut dalam pembangunan daerah sehingga membantu pemerintah dalam mewujudkan visi-nya. Namun fakta di lapangan mengatakan bahwa alumni program PPIK asal Kalimantan Timur tidak secara maksimal aktif pada kegiatan kepemudaan.

Dispora Kaltim dalam hal ini selaku kepanjangan tangan dari Kemenpora RI di daerah bisa merangkul para alumni tersebut dengan melakukan pembinaan organisasi kepemudaan yang merupakan salah satu program dari Dispora Kaltim untuk PCMI Kalimantan Timur yang di dalamnya terdapat para alumni PPIK. Ini merupakan catatan penting untuk Dispora Kaltim untuk ke depannya dapat berpartisipasi mengontrol para alumni, maupun menstimulasi sifat aktif mereka dengan memberikan wadah seperti program-program kepemudaan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan para alumni.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan program PPIK di Provinsi Kalimantan Timur telah dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas pemuda melalui bidang penyadaran pemuda dengan landasan Undang-undang No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kemudian juga program PPIK sudah relevan antara tujuan program PPIK dengan Visi Provinsi Kalimantan Timur maupun juga Visi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sendiri sehingga program PPIK sesuai dan dapat dijalankan di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi indikator keberhasilan program. Namun, Dispora Kaltim selaku penyelenggara seleksi, tidak memahami *content* program PPIK, akibat dari kurang proaktifnya Dispora dalam mencari informasi dan juga tidak jelasnya penjelasan mengenai program pada saat rapat koordinasi secara nasional.

Panduan pelaksanaan seleksi juga kriteria peserta sudah memenuhi indikator yang ada dengan Kemenpora RI memberikan surat kepada Dispora Kaltim dengan surat No.2.12.3/DII-5/II/2019 yang berisi 7 (tujuh) poin panduan dalam melaksanakan seleksi PPAN yang di dalamnya terdapat

program PPIK di Provinsi Kalimantan Timur. Pada poin-poin tersebut tercantum panduan pelaksanaan seleksi seperti penentuan tim seleksi, materi yang diujikan, kadar bobot penilaian dan lain-lain juga kriteria peserta yang diinginkan oleh program agar *output* dari program PPIK lebih dapat dicapai. Namun, panduan pelaksanaan masih menemui ambiguitasnya pada saat diterapkan pada proses karena tidak adanya kontrol langsung dari pusat tentang pengaplikasian panduan tersebut. Kemudian juga untuk kriteria peserta perlu adanya kriteria tambahan yaitu *inter* dan *intra personal* karena program lebih banyak membutuhkan keahlian tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan program, juga kriteria tes *TOEFL* dirasa belum relevan mengingat tes tersebut hanya tes Bahasa Inggris tertulis sedangkan di program dibutuhkan banyak kemampuan komunikasi verbal.

Sosialisasi, Dispora Kaltim hanya sebatas mengirimkan surat edaran ke Dispora se-Kalimantan Timur mengenai adanya seleksi program PPIK di Kalimantan Timur namun tidak melaksanakan sosialisasi melalui sosial media, radio, televisi atau datang langsung ke pusat pemuda, sehingga untuk komponen sosialisasi secara umum tidak memenuhi indikator keberhasilan program. Kemudian untuk seleksi peserta, kegiatan seleksi Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada sesuai dengan panduan pelaksanaan seleksi yang ada dengan membentuk Tim seleksi yang berasal dari bidang-bidang yang menjadi poin tes. Seleksi dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari di Kota Samarinda tepatnya di Gedung Kwarda Pramuka, Balai Bahasa Universitas Mulawarman dan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga untuk seleksi peserta telah memenuhi indikator keberhasilan program. Namun, pelaksanaannya hanya berpusat di kota Samarinda, padahal perlu juga untuk mengadakan seleksi di setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Untuk pembekalan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan kegiatan pembekalan kepada peserta Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada yang terpilih sebagai bekal untuk memasuki program dengan alasan tidak tersedianya anggaran. Kemudian PCMI Kalimantan Timur secara independen membuat pembekalan bagi peserta yang terpilih namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga belum maksimal dalam memberikan pembekalan. Sehingga untuk pembekalan tidak memenuhi indikator keberhasilan program. Dan yang terakhir pada adalah *Post Program Activity (PPA)* yang mana secara mayoritas tidak dilaksanakan oleh peserta PPIK asal Kalimantan Timur, peserta tidak membuat *Post Program Activity* yang seharusnya bersangkutan dengan pemberdayaan masyarakat atau pemuda yang ada di Kalimantan Timur. Sehingga untuk *PPA*, tidak memenuhi indikator keberhasilan program.

Para alumni Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada beberapa masih melaksanakan kegiatan kesukarelawanan mereka namun tidak aktif pada kegiatan kepemudaan akibat minimnya sarana dan prasarana. Maka dari itu, untuk pemuda aktif kegiatan kepemudaan-pun belum memenuhi indikator keberhasilan program.

Dari hasil evaluasi secara keseluruhan, ditemukan bahwa pada aspek *process*, beberapa komponen tidak dilaksanakan seperti sosialisasi yang mana sangat penting dalam menyebarkan informasi seleksi sehingga para peserta yang mendaftar lebih banyak dan kompetitif, komponen pembekalan

juga tidak dilaksanakan yang mana sangat penting untuk memberi bekal pengetahuan juga pemahaman sehingga peserta tidak kaget dengan jalannya program dan cepat beradaptasi, yang paling krusial adalah *PPA* yang tidak dilaksanakan oleh peserta yang mana jika komponen ini tidak dilaksanakan, maka pemuda aktif kegiatan kepemudaanpun sulit untuk dicapai pada aspek *product*, karena pemuda pelopor saja tidak aktif, bagaimana dengan pemuda lainnya. Sehingga program PPIK di Kalimantan Timur bisa dikatakan tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi pemuda pada kegiatan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Saran-saran

Terkait dengan temuan bahwa Dispora kaltim tidak memahami isi program PPIK, maka Dinas Pemuda dan Olahraga seharusnya memahami dan mengerti tentang program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada, latar belakangnya, seperti apa programnya sehingga bisa membantu dalam mencari sosok pemuda Kalimantan Timur yang tepat buat program tersebut, selanjutnya dapat memberitahukan kepada seluruh panitia yang terlibat lebih spesifiknya adalah tim seleksi, sehingga tim seleksi dapat lebih selektif dan menyesuaikan sosok yang dipilih dengan program PPIK. Dikarenakan pihak Dispora Kaltim belum secara utuh memahami apa itu program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada dan hal ini dapat menyebabkan ketidak efektifan seleksi yang diadakan karena memahami inti program menjadi penting untuk menyesuaikan sosok yang terpilih dengan program PPIK, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Kemenpora RI mengenai program dan juga Dispora Kaltim yang kurang proaktif dalam mengejar informasi.

Terkait tidak adanya kontrol saat pelaksanaan seleksi dari pusat, maka pedoman pelaksanaan seleksi harus dikontrol dalam pengaplikasiannya agar tidak ada perbedaan persepsi, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur agar proaktif menanyakan hal atau poin yang kurang jelas atau multi tafsir kepada Kemenpora RI agar dalam pelaksanaan tidak ada kesalahan persepsi maupun salah pelaksanaan.

Pada kriteria peserta untuk poin Bahasa Inggris yang dalam tes masih berbasis *written test* di Kalimantan Timur, harus dibarengi dengan *conversation test*, karena di dalam program sangat dibutuhkan sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik bukan menulis dengan baik. Kemudian untuk kriteria yang bisa menjadi pertimbangan adalah kempauan *inter* dan *intra personal*, karena ketika di dalam program PPIK, para peserta lebih banyak berinteraksi dengan orang lain.

Terkait tidak adanya sosialisasi yang diadakan oleh Dispora Kaltim, maka Dinas Pemuda dan Olahraga seharusnya mengadakan sosialisasi yang tidak sebatas menyurati Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Timur, namun juga proaktif mendatangi pusat keramaian pemuda juga menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media yang ada seperti sosial media, radio maupun televisi, karena dengan data yang ada, tanpa bantuan PCMI Kalimantan Timur melaksanakan

sosialisasi *door to door*, peserta yang mengetahui adanya seleksi hanya segelintir sehingga kurang kompetitif.

Sosialisasi mengenai program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada perlu menyentuh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur, tidak hanya di Kota Samarinda saja, karena potensi yang ada di daerah tidak terekspos karena kekurangan dari PCMI Kalimantan Timur yang hanya bisa mengadakan sosialisasi di Kota Samarinda saja. Maka dari itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan sosialisasi PPIK di Kalimantan Timur.

Untuk pelaksanaan seleksi Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada yang termasuk dalam rangkaian seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara di Provinsi Kalimantan Timur harus menyebar ke semua Kabupaten/Kota dan tidak hanya diadakan di Kota Samarinda saja sebagai ibukota provinsi. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur harus mengalokasikan dan menghibau atau menugaskan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga yang ada di Kabupaten/Kota untuk mengadakan seleksi tingkat daerah Kabupaten/Kota agar kesempatan yang sama dapat dirasakan oleh seluruh pemuda yang ada di Kalimantan Timur.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur seharusnya mengadakan pembekalan kepada peserta terpilih agar mereka bisa siap ketika memasuki program. Atau memfasilitasi kegiatan pembekalan yang diadakan oleh PCMI Kalimantan Timur agar kegiatan pembekalan dapat berjalan secara maksimal. Karena dengan adanya pembekalan, maka peserta akan merasa jauh lebih siap dalam mengikuti program PPIK.

Peserta PPIK asal Kalimantan Timur seharusnya melaksanakan *Post Program Activity* dengan atau tanpa pengawasan, karena ini merupakan kewajiban yang harus dituntaskan ketika program selesai dan kembali ke Kalimantan Timur. Karena tanpa adanya *PPA* yang dilaksanakan, maka pemuda aktif kegiatan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur sulit untuk diwujudkan.

Pengawasan serta kontrol harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga PCMI Kalimantan Timur, agar pelaksanaan *Post Program Activity* dapat terlaksana. Juga sarana dan prasarana masih menjadi perhatian pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk disediakan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur agar menaruh perhatian lebih untuk memberdayakan alumni program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada agar dapat berkontribusi lebih pada kegiatan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan menyediakan sarana dan prasaran, menjalin komunikasi yang lebih baik serta menyediakan wadah dengan melahirkan program-program kepemudaan yang dapat menjadi tempat bagi para alumni untuk dapat mengembangkan atau menyalurkan apa yang mereka dapat ketika mengikuti program. Sehingga tujuan program untuk dapat meningkatkan aktivitas kepemudaan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1988. *Evaluasi Program Pendidikan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Edisi 2. Bumi Aksara: Jakarta.
- R. Terry, George & Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. ETD UGM: Yogyakarta.